

**PRAKTIK-PRAKTIK PENGUASAAN KELAS DOMINAN DALAM
MENTRANSFORMASIKAN ORIENTASI GERAKAN PARPOL**

(Studi Transformasi Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera Sejak Tahun 1980-2004)



**Skripsi Diajukan pada Program Studi Ilmu Sosial dan Politik sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana sosial**

**ARIF MOHANDI ALAM
07061002061**

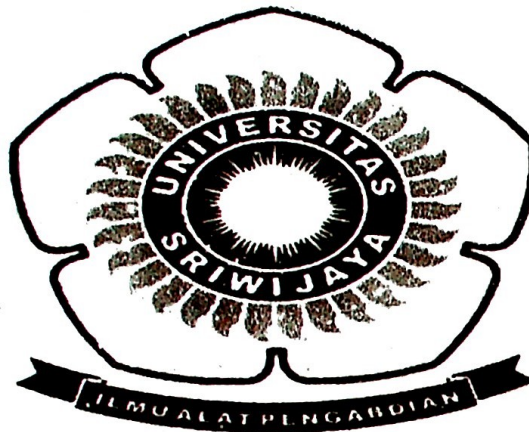
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2010-2011**

S
324-207
Ani
P
2011

Record: 25239
Reg: 25800

**PRAKTIK-PRAKTIK PENGUASAAN KELAS DOMINAN DALAM
MENTRANSFORMASIKAN ORIENTASI GERAKAN PARNAS**

(Studi Transformasi Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera Sejak Tahun 1980-2004)



Skripsi Diajukan pada Program Studi Ilmu Sosial dan Politik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial

ARIF MOHANDI ALAM
07061002061

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2010-2011**

**PRAKTIK-PRAKTIK PENGUASAAN KELAS DOMINAN DALAM
MENTRANSFORMASIKAN ORIENTASI GERAKAN PARPOL**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinvatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal, 20 Juli 2011**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dr. Zulfikri Suleman, MA

Ketua

Drs. Tri Agus Susanto, MS

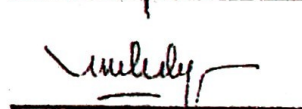
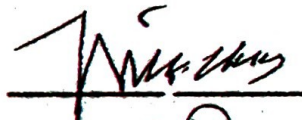
Anggota

Dr. Ridhah Taqwa, M.Si

Anggota

Dra. Eva Lidya, M.Si

Anggota



Indralaya, Juli 2011

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Depan,

Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si

NIP. 19601002 1992 032001



LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTIK-PRAKTIK PENDOMINASI KEKUATAN DOMINAN DALAM
MENTRANSFORMASIKAN ORIENTASI GERAKAN PARPOL**

SKRIPSI

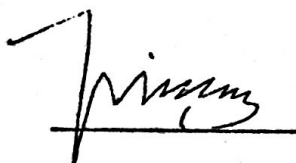
**Telah Disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti
ujian komprehensif dalam memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat S-1 Sosiologi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh :

**Arif Mohandi A.S.
07061002061**

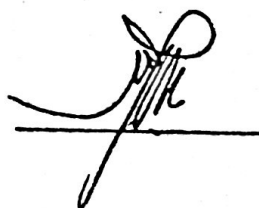
Pembimbing I

**Dr. Zulfikri Suleman, M.A
NIP. 195907201985031002**



Pembimbing II

**Drs. Tri agus Susanto, M.S
NIP. 195808251982031003**



Moto Hidup

Orang yang merasa dirinya merdeka ialah orang yang selalu menghargai perjuangan para pembebasnya, dan orang yang merasa yakin untuk dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik ialah orang yang mampu menumpahkan ratusan tetesan keringat dalam perjuangan hidupnya.

Bacalah tentang apapun yang kau baca, maka apa yang engkau baca sama seperti apa yang engkau rasakan dalam perasaan hatimu dan pikiranmu. (Arif Alam.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah dimuka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Orang tua, Bapak Jakfar Hanafi Sampurna serta Ibu Tri Hantini yang banyak memberikan dukungan dan selalu bersikap sabar .
2. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Tri Agus Susanto, M.S, selaku pembimbing II yang telah banyak mamberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.
3. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada para Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, saya ucapkan terima kasih atas semua ilmu yang saya terima sesuai dengan kapasitas saya sebagai mahasiswa yang haus akan

ilmu ketimbang nilai akademik sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga apa yang kalian berikan dapat menjadi amal bakti di hari akhir nantinya. Amin

4. Dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI.
5. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Palembang, 11 juli 2011.

Penulis

Arif Mohandi Alam
07061002061

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	X

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tinjauan Pustaka	8
1.3.1 Partai Politik	13
1.3.2 Fungsi Partai Politik	17
1.3.3 Pengembangan Parpol melalui actor	18
1.4 Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian	23
1.4.1 Tujuan Penelitian	23
1.4.2 Manfaat Penelitian	23



1.5.	Kerangka Pemikiran	23
1.5.1	Hegemoni Kelas Dominan	26
1.5.2	Teori asal Mula Partai Politik (Duverger)	31
1.6.	Definisi Konsep	33
1.7.	Model Analisi	34
1.8.	Asumsi Penelitian	35
1.9.	Metode Penelitian	36
1.9.1	Pendekatan Penelitian	36
1.9.2	Tipe Penelitian	37
1.9.3	Keabsahan Data.....,.....	37
1.9.4	Fokus Penelitian	38
1.9.5	Informan	38
1.9.6	Data Dan Sumber Data,.....	38
1.9.7	Data	38
1.9.8	Sumber Data	39
1.9.9	Teknik Pengumpulan Data	39
1.9.9.1.	Wawancara Mendalam	39
1.9.9.2.	Teknik Dokumenter	39
1.9.10	Gambaran Pengumpulan Data	40
1.9.11	Unit Analisis	41
1.9.12	Penentuan informan	42
1.9.13	Sisitematika Penulisan	43

BAB II Gambaran Umum

2.1	Sejarah Berdirinya PKS	45
2.1.1	Pendirian PKS	47
2.1.2.	PK serta PKS sebagai partai ekstra parlemen...	50

2.1.3. Pergeseran PKS menjadi partai intra parlemen pasca 2004.....	53
2.2 Jaringan struktur PKS	55
2.2.1. DPW Partai Keadilan di setiap Profinsi	58
2.2.1. Militansi Kader PKS,.....	58
2.2.3. Anggota kader inti yang terdiri dari	59
2.2.4. Masa Pengajian siri dan non organisasi.....	60
2.2.5. Masa organisasi (lembaga dakwah kampus)..	64
2.2.6. Gerakan Dakwah Kampus	71

BAB III *Praktik-praktik Domminasi Kekuatan Dominan Dalam mentransformasikan Gerakan Parpol.....* 72

3.1.. Modus transformasi di mulai sejak Pergeseran PK menjadi Partai Intra Parlemen.....	73
3.1.1. Transformasi partai sebagai hasil dari ranah penegasian antar kelas fundamental dengan kelas oprtunistis materialis	84
3.2.. Transformasi yang dialami PKS di katagorikan sebagai sebuah gerakan yang berhasil di depolitisasi oleh kekuatan dominan dimana depolitisasi kekuatan dominan dimulai sejak Orde Baru	86
3.2.1. Hubungan Negara dengan Kelompok Islam	91
1. Rezim Orde Baru	92
2. Militer sebagai Kekuatan Politik	93
3. Pengusaan kelas oleh organ-organ intelektual ditubuh PKS	97

3.2.3	Hegemoni Parti Sistem	103
3.2.4.	Pengaruh 'Periode Tahun 1906-1986' terhadap Gerakan Tarbiyah	107
1.	Periode Tahun 1966-1981.....	108
2.	Hubungan Islam dan Orde Baru.....	110
3.	Periode Tahun 1982-1986	112
4.	Pengaruh Periode Tahun 1982-1986 terhadap Gerakan Tarbiyah	113
5.	Periode Setelah Tahun 1986	118
7.	Pengaruh Periode Setelah Tahun 1986 terhadap Gerakan Tarbiyah	120
8.	Berhasilnya Proses Depolitisasi Oleh Kekuatan Dominan Terhadap Gerakan Islam	122
9.	Berhasilnya proses depolitisasi terhadap gerakan ikhwanul muslimin yang berbasis di partai PKS	127

BAB IV

3.3.	KESIMPULAN	129
3.4.	SARAN	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Modal Analisis	35
--------------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penentuan Informan	42
Tabel 2 Jaringan Struktur PKS	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukkan

Lampiran 2 Kartu Bimbingan

Lampiran 3 Surat Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Peta Gerakan Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wujud Islam yang tertransformasikan ke dalam jagad modern di bawah pengaruh Barat itu lebih membentuk kekuatan-kekuatan politik dari pada kekuatan kultural dan intelektual. Dengan kata lain, wujud transformasi itu adalah terbentuknya kelompok-kelompok sosial politik Islam melalui adopsi segi-segi teknikal dan gagasan-gagasan mereka dengan ideologi Islam. Dalam konteks ini tidak seperti yang di inginkan, yang menghasratkan penerimaan penuh baik nilai maupun segi teknikal Barat di kalangan Islam, seperti lukisannya terhadap Kemal Attaruk, kelompok Islam yang tertransformasikan melalui pengaruh teknikal Barat itu justru malah mengsekulerisasikan kepentingan dakwah.

Tentu saja, baik intensitas maupun substansi pengaruh dan transformasi kelompok-kelompok Islam itu berbeda-beda. Tapi suatu hal yang jelas adalah bahwa pertemuan tak seimbang antara Barat yang hegemonik dan kalangan Islam yang memendam rasa kebesaran di masa lampau, dan karenanya bersifat eksplosif itu senantiasa melahirkan hasrat perjuangan dan kelompok-kelompok politik di kalangan terakhir. Demikianlah, seperti kita saksikan dalam sejarah, pada abad ke-19, di timur tengah dan Afrika Utara yang hampir sepenuhnya mengalami hegemoni Barat, Islam senantiasa tampil sebagai hegemoni dan pusat-pusat perlawanan politis terhadap Barat.

Untuk konteks Indonesia, fakta sejarah perlawanan rakyat terhadap Hegemoni Barat dengan basis ideologi Islam abad ke-19 sangat berlimpah. Apa yang ingin dan ditekankan di sini adalah bahwa betapa terpananya kelompok-kelompok ini diawal abad ke-20 dalam bentuk organisasi-organisasi politik, terhadap politik dan ideologi justru setelah bersinggungan dengan wajah kekuatan birokrat yang hegemoni kebarat-baratan. Tentunya, banyak hal yang bisa menjelaskan mengapa justru kecenderungan tipikal semacam ini yang lahir dari kontak-kontak yang bersifat tak seimbang tersebut. Tapi suatu hal yang jelas, di tengah tak keseimbangan hubungan-hubungan itu, dimana barat hampir mendominasi seluruh peralatan teknis dan kultur penindasan, satu-satunya jalan untuk mengartikulasi diri bagi Islam adalah ruang politik dan ideologis. Dalam ruang ini Islam bukan hanya mengomandokan dari massa Islam antar pulau, sehingga wertheim cenderung menyebut Islam sebagai proto-nasionalisme. Tetapi di atas itu, dan “mungkin” berbeda dengan agama lain yang cenderung meminjam ideologi sekular untuk aktivitas politik, seperti komunisme dalam revolusi Rusia. Islam memiliki kekayaan doktrinal dan pengalaman politik yang segera bisa di transformasikan atau di rekonstruksikan menjadi ideologi dan lebih dalam lagi “kepercayaan” atau “keyakinan” politik, tanpa harus meminjam kepada ideologi lain.

Maka dalam keterpanaan terhadap politik dan ideologi yang demikian rupa inilah, kristalisasi ajaran-ajaran ideologi Islam terhadap politik terjadi di kalangan Islam. kristalisasi ini merumuskan betapa lekatnya hubungan Islam dengan politik, sehingga seperti dicetuskan K.H.A. Wahab Chasbullah pada 1956 layak

gula dengan sifat manisnya. Atau seperti dirumuskan Natsir, Islam “adalah filsafat hidup; sebuah ideologi, sebuah sistem kehidupan bagi dunia dan akhirat, dan karenanya kita kaum muslimin tidak bisa melepaskan diri dari politik. Walau kalimat-kalimat yang dikutip di atas tidak secara teknikal merujuk kepada teks, namun pernyataan-pernyataan tersebut bersifat doktrinal. Dalam arti bahwa aktivitas dan kegiatan politik dipahami, seperti diungkapkan Natsir dan Casbullah diatas sebagai manifestasi terdalam dari tuntutan dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, seperti juga terjadi di dunia Islam lainnya, pertemuan antara Islam Indonesia dengan wajah kekuatan Barat yang hegemonik itu bertentangan dengan hasrat Snouck Hurgronje, yang lebih melahirkan “Islam politik” dari pada “Islam kultural” atau “intelektual”. Gelombang pasang-surut organisasi-organisasi sosial keagamaan dan politik Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta lahirnya pemimpin dan politisi Islam, seperti tercermin dalam pribadi Natsir adalah perpaduan yang “aneh” (karena bersifat kontradiktif di dalam dirinya) antara Islam (Indonesia) dan peradaban Barat. Keduanya berhubungan secara fungsional, Islam menyajikan basis kepercayaan ideologi politik, sementara barat menyajikan perlatan organisasional untuk merealisasikan cita-cita (politik) itu, tetapi dengan tujuan dan hasil berbeda.

Islam politik” dengan demikian, adalah sebuah paradigma pandangan, sikap dasar dan tingkah laku politik baku organisasi-organisasi dan para politisi Islam yang tersesuaikan di dalam struktur hubungan tak seimbang mereka dengan wajah kekuatan barat. Karenanya, paradigma “Islam Politik” ini lahir dalam struktur sejarah yang khusus. Yakni ketika Islam Indonesia, dalam posisi yang

inferior, secara langsung harus berhadapan dengan supremasi aktor dunia (wajah kekuatan barat) dalam wujudnya yang paling jahat: kolonialisme.

Padahal Islam menempati posisi strategis dari perjalanan Bangsa Indonesia. Berada dalam ruang dan sendi kehidupan yang lebih luas dari sekedar bentuk ritual spiritual. Islam tidak saja terejawantahkan dalam kehidupan seorang manusia kepada Pencipta. Tetapi juga terefleksikan dalam kehidupan antar manusia dan manusia dengan sekelilingnya. Tak pelak dalam kehidupan sosial politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Islam.

Islam mempengaruhi kehidupan sosial-politik di Indonesia sejak zaman kerajaan Inggris masa kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Islam bermetamorfosis dalam berbagai bentuk gerakan yang bersifat kultural dan struktural. Sebagai kelompok, Islam di perhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia selama ini. Sejarah Indonesia banyak diiringi oleh Islam sebagai gerakan politik.

Dalam perjalanannya gerakan politik Islam tidak berada dalam bentuk yang statis tetapi selalu berubah sesuai tuntutan situasi dan kondisi. Gerakan politik Islam adalah gerakan dalam bentuk yang dinamis, karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial-politik di sekelilingnya yang juga dinamis. Dinamis dimaksudkan sebagai dinamika cara, bentuk serta sarana yang digunakan tanpa mengubah substansi serta tujuan utama dari gerakan politik Islam tersebut. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah keberadaan dan tindakan suprastruktural kepada gerakan politik Islam.

Dengan tetap tampilnya gerakan politik Islam hingga saat ini merupakan bukti keberhasilannya dalam beradaptasi pada berbagai keadaan sosial-politik di luarnya, karena keadaan sosial-politik yang ada selama ini tidak selalu bersahabat apalagi memihak kepada gerakan politik Islam.

Seringkali kondisi yang ada justru sebaliknya. Ada kalanya supra struktural atau kelompok sosial-politik lain menampilkan wajah yang konfrontatif dan tidak kompromistis terhadap gerakan politik Islam. Gerakan politik Islam tidak jarang berada dalam ancaman, tidak hanya sebagai lawan politik tetapi lebih dari itu. Keadaan tersebut setidaknya terjadi pada masa Orde Baru. Setelah kendaraan politik umat Islam saat itu, Masyumi, dibubarkan oleh Soekarno. Harapan umat Islam kembali hadir pada rezim Orde Baru dengan Soeharto sebagai pemimpinnya. serta merta Masyumi diusulkan umat Islam untuk di rehabilitasi, tetapi pemerintah Orde Baru dengan tegas menolak. Hal tersebut adalah permulaan dari banyaknya harapan umat Islam yang pupus di tangan Orde Baru. Sikap saling mencurigai kemudian muncul diantara umat Islam dengan pemerintah, bahkan Orde Baru semakin menunjukkan sifat represifnya. Pemberlakuan izin bagi setiap kegiatan keagamaan, pemberlakuan azas tunggal Pancasila, fungsi partai politik hingga pembatasan hak berserikat di kampus dengan NKK./BKK-nya.

Menurut Din Syamsudin, agenda politik Orde Baru mencakup depolitisasi Islam. Proyek ini menurutnya didasarkan pada anggapan bahwa Islam yang kuat secara politik akan menjadi hambatan bagi modernisasi. Mereka berharap dengan mendepolitisasi Islam, akan dapat mempertahankan kekuasaan dan melindungi

kepentingan-kepentingan mereka.¹ Dengan keadaan politik serta sikap pemerintah yang tidak kondusif dengan keberadaan umat Islam.

Depolitisasi gerakan islam ini diambil alih intelektual organik untuk mendapatkan posisi tawar, dalam praktik-praktik nya pemerintah tidak secara kentara mengkondisikan orientasi gerakan parpol melalui berbagai kebijakan serta menyusupkan para agen-agen intelektualnya ke-dalam basis gerakan, prakti-prakti pengendali semacam ini merupakan mekanisme kerja birokrasi atas unsur ketidak senangan terhadap orientasi perjuangan umat Islam.

Akibatnya Pergerakan Islam termaksud di dalamnya Islam Politik juga sangat terbatas. Pergerakan Islam banyak mengalami kondisi pergeseran orientasi dari mazhab organisasinya, corak dari kelas fundamental ternegasikan oleh setiap kelas-kelas yang berwatak oportunistik. Selain itu kekuatan kelas fundamental dari basis konserpatif menjadi melemah dikarenakan intelektual represif menjadi antipatif reaktif untuk selalu melancarkan praktik-praktik tindak penekanan terhadap para pembangkang. Selain itu juga stigmasi negatif terhadap partai Islam digalakan melalui media masa agar publik memiliki paradigma sinis terhadap setiap partai-partai Islam yang berjuang keras menerapkan syariat Islam. Tercatat dalam sejarah bahwa banyak partai Islam yang mengalami kondisi pergeseran orientasi dari mazhab organisasinya. Salah satu contoh yang penulis angkat dalam skripsi ini ialah transformasi PK ke PKS yang mana pada awalnya

¹ Dikutip dari M Din Syamsudin, *Islam dan Politik Orde Baru*(Jakarta: 2001), Logos Wacana Ilmu, hlm' 63' Lihat Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Intermasa 2009), hlm. 320.

partai ini adalah jamaah dakwah dari basis keagamaan, dimana sebelum gerakan dakwah ini bertransformasi menjadi gerakan partai politik, aktifitas-aktifitas para kadernya banyak terlibat dalam rutinitas keagamaan yang tidak bermuatan politik, namun ketika terjadinya suatu proses transformasi dari gerakan sosial keagamaan menjadi gerakan politik, justru malah membuat gerakan masa ini melenceng dari orientasi mazhab organisasinya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari sekian banyak partai politik Islam di Indonesia, PKS menjadi suatu fenomena tersendiri setidaknya saat partai ini merubah orientasi pergerakannya. Jika kita melihat sejarah perjalanannya, partai ini yang telah beberapa kali mengalami proses transformasi, dimana transformasi terbesarnya adalah perubahan dari partai dakwah menjadi partai politik oportunistis, jika dirunut melalui pendekatan sejarah tentunya transformasi ini muncul karna adanya dorongan dari kelas penguasa yang melakukan praktik-praktik dominasi kekuatan dominan dalam merubah orientasi awal gerakan parpol yang tadinya sebagai partai dakwah dan kini malah berbalik arah menjadi partai pemburu suara.

Atas dasar uraian tersebut maka penulis mencoba mengangkat permasalahan dalam pertanyaan berikut :

- Bagaimana praktik-praktik penguasaan kelas dominan itu berlangsung dalam mentransformasikan orientasi gerakan parpol ?

- Mengapa partai politik hasil dari suatu proses transformasi dikategorikan sebagai sebuah gerakan yang berhasil didepolitisasi oleh kekuatan pendominasi ?

Dalam rumusan masalah di atas penulis mencoba memaparkan praktik-praktik dominasi kekuatan dominan dalam satu batang tubuh parpol, dimana orientasi awalnya menegaskan oleh logika oportunistik dari kelas pendominasi yang memiliki peran kontrol dalam membendung hegemoni ideologi dari basis kelas-kelas fundamental. Dalam skripsi ini juga, penulis mencoba membedah ruang politik kelas pendominasi, dengan menggunakan analisis Antonio Gramsci mengenai kelas yang terdominasi. sebagai modus analisis dalam membedah praktik-praktik kelas pendominasi pengontrol ideologi.

1.3 TINJAUAN PUSTAKA

Terbentuknya partai politik Islam seperti PKS sebagai gerakan dakwah Islam berawal dari pengajian di ruangan-ruangan sempit masjid kampus yang telah lama mewarnai perpolitikan yang ada di Indonesia. Basis dari gerakan Ikhwanul muslimin ini mampu mengukuhkan diri secara legal formal menjadi sebuah partai politik. Tidak hanya perolehan suara serta peringkatnya dalam pemilu yang mengalami kenaikan persentase dari Pemilu 1999 (1,36) dan 2004 (7,3%)². Tetapi juga warna gerakan Islam yang sama sekali baru dari gerakan-gerakan Islam yang telah ada di Indonesia sebelumnya. Semuanya tidak terjadi dalam sekejap, tetapi memerlukan waktu yang relatif cukup panjang. Gerakan

² Lili Romli, *Islam yes Partai Islam yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm 64.

Ikhwanul Muslimin mulai melekatkan pondasinya di Indonesia sejak tahun 1974 tetapi lebih menonjolkan erat pertama-nya pada 1980.

Setidaknya Gerakan ikhwanul muslimin telah memulai dua dekade hingga didirikannya PK (Partai Keadilan) di tahun 1998 dan bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS di dirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun hijriah) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (atau 26 Rabi'ul Awwal 1419 h) . Dimana partai ini mengalami suatu proses transformasi dalam tubuh organisasinya yang tadinya bersifat konserpatif, organisasi ini lebih eksklusif tertutup dan hanya menyuarakan kembalinya penerapan syariat islam.³

Organisasi masa yang bersifat konserpatif ini lebih prinsipil sifatnya dimana organisasi ini memiliki sifat-sifat coherence (keteguhan) dalam setiap aktifitas yang mereka canangkan dan salah satu agenda besarnya adalah menyuarakan kembalinya kejayaan-kejayaan Islam. Namun ketika orientasi perjuangan dari basis Ikhwanul Muslimin ini terdominasi oleh setiap kelas berwatak oportunist maka sesuai dengan keputusan PKS mengadakan Mukernas di Bali, PKS mengukuhkan dirinya sebagai partai yang terbuka bagi non Muslim, PKS sebagai partai Islam memiliki beberapa anggota parlemen di kawasan Indonesia Timur beragama non Islam , Mengadakan Munas II di Hotel Ritz-

³ Ali Said Damik. 2002. *Fenomena Partai Keadilan "Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia"* (Jakarta: Teraju,2002), hlm.32.

Carlton , Mengundang beberapa Dubes termasuk Dubes Amerika Serikat untuk berdialog tentang Islam ⁴ .

Penegasan itu memperkuat pernyataan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Februari 2008, bahwa kelompok keagamaan yang berbenturan dengan pluralitas akan hancur. Karena itu, tidak mengherankan, meski dinamika politik selama empat minggu terakhir ini kumuh dan sarat dengan politik kepentingan serta gagasan sesat seperti dana aspirasi, keputusan Musyawarah Nasional II PKS sebagai partai terbuka menjadi memesona. Ibaratnya, ia melakukan salto mortal, loncatan berputar yang atraktif dan memukau publik.

Peneguhan itu adalah penampakan (fenomena) yang mengentak kesadaran publik, yang selama ini menganggap PKS sebagai partai yang militan, eksklusif, dan berpaham Islam konservatif, tegas menyatakan sebagai partai inklusif.

Sedemikian kuatnya persepsi itu, meski tanda PKS sebagai partai terbuka sudah dilakukan sejak tahun 2000, banyak kalangan meragukan otentisitas niat itu. Afirmasi menjadi *extraordinary event* karena diputuskan dalam forum yang bobot politisnya tinggi.

Karena itu, meski perubahan itu memicu kontroversi internal, tetapi tetap sarat makna. PKS sedang berjuang dan mengukir sejarah meninggalkan stigmatisasi sebagai partai kanan, eksklusif, dan ortodoks, menjadi partai moderen, demokratis, dan progresif. Sebagai simbol keterbukaan, PKS bahkan

⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2010/06/17/10404156/Dilema.Politik.Dua.Kaki>

mengundang beberapa wakil dari negara Barat, seperti Jerman, Australia, dan Amerika Serikat, yang selama ini memiliki sikap dan pandangan yang berbeda mengenai isu yang menjadi kepedulian PKS, yaitu eksistensi negara Palestina. Bahkan, negara itu responnya juga samar-samar terhadap serbuan Israel pada kapal Freedom Flotilla yang menuju Gaza dengan misi perdamaian.

Sikap itu juga menunjukkan PKS percaya diri dan bukan partai yang harus inferior terhadap negara adidaya. Memperjuangkan cita-cita melalui dialog langsung dalam suasana kesetaraan dan bermartabat menjadi strategi komplementer bersamaan dengan gelar pengerahan massa yang kadang-kadang diperlukan. Namun, strategi baru itu diduga tidak lagi terlalu menonjolkan simbol agama mengingat masalah Palestina bukan sekedar isu agama, melainkan lebih merupakan masalah politik kekuasaan.

Salah satu faktor obyektif yang mendorong tekad PKS menjadi partai tengah adalah kenyataan pluralitas masyarakat Indonesia merupakan rajangan garis silang-menyilang. Struktur masyarakat yang demikian tak memungkinkan terbelah dalam kelompok eksklusif secara permanen⁵.

Kesetiaan lintas primordial menjadi instrumen politik yang efektif. Susunan masyarakat semacam itu hanya mungkin terjadi dalam sebuah bangsa yang mempunyai modal sejarah yang sangat panjang, dan kemudian menghasilkan modal sosial bagi bangsa yang bersangkutan. Ikatan primordial semakin menjadi tidak relevan sebagai basis konstituensi partai politik. Sejarah

⁵<http://nasional.kompas.com/read/2010/06/17/10404156/Dilema.Politik.Dua.Kaki>

telah membuktikan bahwa partai politik yang melulu mendasarkan diri pada solidaritas primordial semakin pudar pamornya.

Meski demikian, peneguhan PKS sebagai partai inklusif menghadapi setidaknya-tidaknya dua tantangan. Pertama, kemungkinan resistensi dari kalangan dalam partai, terutama dari kalangan Islam *konservatif* yang selalu tidak mau kompromi dengan semua bentuk ranah-ranah yang berbau. Persoalannya sejauh mana visi dan misi baru dapat menyinergikan kalangan *konservatif* dengan mereka yang *progresif* mengingat Munas bahkan menegaskan kader non-Muslim juga punya kesempatan jadi petinggi partai, sama dengan mereka yang menempuh jalur kaderisasi ke Islaman.

Terlepas dari semua makna yang terkandung pada (Visi dan Misi nya selalu mengedepankan sisi intelektualitas bagi para kader-kader mudanya bahkan keterbukaan bagi non muslim ikut serta dalam partai politik). Hal ini dalam tinjauan sosiologisnya merupakan suatu proses transformasi parpol.⁶ kearah yang lebih progresif dan selalu mengedepankan sisi-sisi seruan moral dan intelektualitas.

Sebagai partai politik Islam sangat signifikan dengan modal sosial yang cukup luar biasa, sebagai embrio dakwah Islam dengan eksistensinya memiliki akar gerakan moral bagi bangsa ini sebagai, pelaku perubahan dengan misi perubahan pada ranah kultur dan ideologis dalam warna gerakannya, kepastian gerakan ini sudah barang tentu bagi semua aktor mengemban amanah dakwah rosul agar dapat merubah sitem pemerintahan sekuler, sebagai gerakan Islam

⁶. Ali Said Daminik, *Fenomena PK*. (Jakarta: Teraju, 2002), hal.34

tentunya sangat strategis sebagai basis gerakan intelektual. (menurut Edwad Shill) untuk dapat mengangkat geraka partai sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial yang khas, menurut shill ada lima fungsi kaum intelektual, yaitu, Pertama, melakukan penciptaan dan penyebaran kebudayaan tinggi. Kedua, menyediakan bagan nasional dan antar bangsa Ketiga, membina pemberdayaan, Ke empat, mempengaruhi perubahan sosial, Kelima, memainkan peran politik. Menurut Arbi Sanit, parpol hanya memerankan ketiga terakhir. Sementara menurut Samuel Huntington, parpol hanya mempunyai fungsi dalam memainkan peranan politik.

Bila kita melihat beberapa perspektif di atas, bahwa peran Partai politik , sangat strategis dalam memainkan perubahan bagi bangsa ini karena sebagai gerakan sosial posisinya sebagai alat perubah dalam setiap dinamika perubahan, sadar tidak sadar pencetusan reformasi itu digulirkan oleh elemen-elemen parpol, sekalipun telah banyak mengalami kegagalan. Maka dalam konteks ini para militan sebagai bagian gerakan parpol berhak bahkan keniscayaan memiliki fungsi-fungsi tersebut.

1.3.1 PARTAI POLITIK

Partai politik merupakan konsep utama menunjuk kekuatan politik di masyarakat. Sebagaimana institusi-institusi lainnya, partai politik menyita waktu dan pengorbanan dari para pencipta dan pendukungnya sebelum ia dikenal dan diterima secara luas sebagai salah satu kelengkapan politik manusia modern.

Partai politik merupakan konsep utama menunjuk kekuatan politik di masyarakat. Sebagaimana institusi-institusi lainnya, partai politik menyita waktu dan pengorbanan dari para pencipta dan pendukungnya sebelum ia dikenal dan diterima secara luas sebagai salah satu kelengkapan politik manusia moderen.

Huntington mengklasifikasikan pertumbuhan dan perkembangan partai politik kedalam empat tahap, yaitu ⁷:

1. Faksionalisasi, masyarakat baru mengenal partai sebagai suatu invensi cultural baru di tengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelembagaan politik. Pada tahap ini, separuh dari kesadaran politik masyarakat sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk organisasi politik tradisional. Namun pada saat yang bersamaan belum menemukan penggantinya yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Politik ditandai dengan persaingan sengit antar kelompok atau faksi yang berusaha memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Masyarakat kurang mengenal tuntutan organisasi politik modern yang melibatkan isu stabilitas dan penataan kehidupan politik. Kelompok-kelompok politik sering lebih merupakan sarana untuk menyalurkan dan memperkuat ambisi-ambisi pribadi segelintir orang atau bahkan keluarga. Masyarakat masih sangat asing dengan dua ciri organisasi modern, yaitu organisasi profesional dan basis sosial pendukung organisasi politik tersebut.
2. Tahap polarisasi, dalam tahap ini partai berusaha menerobos dinding-dinding sosial tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara personal. Proses tinggal landas ini didukung oleh kondisi eksternal yang cukup memadai.

⁷ Huntington dalam wena Dezanty Khusuma Bhuwana. 2005. *Sosialisasi Politik Partai Keadilan Dikalangan Mahasiswa*. Dikutip dari Anita Teresia. 2004. *Skripsi yang tidak dipublikasikan*. Jurusan sosiologi Universitas Sriwijaya.

Meningkatnya kesadaran politik warga Negara dengan sendirinya memperluas ruang lingkup partisipasi politik. Moment penting ini segera diikuti dengan meluasnya jenis dan macam kelompok-kelompok politik yang menghasilkan sebuah masyarakat yang majemuk dan kompleks. Heterogenitas masyarakat modern di tengah perubahan sosial ekonomi secara perlahan-lahan menumbuhkan polarisasi kelompok sebagai akibat dari makin kompleksnya masyarakat politik. Masyarakat yang terpolar secara dinamis memperlebar basis sosial masing-masing kelompok sebagai akibat dari kebutuhan untuk memelihara dan memperkuat posisi masing-masing.

3. Tahap ekspansi atau perluasan, dalam tahapan ini partai berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan massa. Persaingan antar partai membutuhkan dukungan massa. Dalam persaingan antar partai, dukungan massa yang luas dan beragam serta berlapis-lapis merupakan syarat pokok untuk membangun kekuatan politik. Kekuatan-kekuatan sosial yang tumbuh dan berkembang membutuhkan sistem partai sebagai sarana menyalurkan dan mengendalikan eksistensi kepentingan kelompok. Dengan kata lain pada tahapan ketiga ini partisipasi politik masyarakat meluap dan memerlukan kontribusi partai sebagai aggregator kepentingan umum.⁸

4. Tahap pelembagaan, merupakan tahap akhir dari pertumbuhan partai politik. Pada tahap ini, sistem partai relatif lebih mencapai tahap mapan. Tanda kemapanan itu antara lain, dengan terbentuknya dua sistem, dua partai, sistem multi partai atau sistem partai tunggal dominan. Sistem partai yang telah

⁸ *Ibid.*

terlembaga relatif tidak banyak mengalami perubahan kuantitas. Pergantian lebih banyak terjadi pada aspek peralihan pemerintahan oleh partai atau koalisi partai-partai lain. Namun perubahan partai penguasa pada umumnya tidak mengganggu jalannya pemerintahan secara umum. Peralihan berlangsung sedemikian rupa sehingga usaha untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dijaga dengan ketat untuk menghindari terjadinya ketidak stabilan politik. Setiap partai politik pastinya memiliki visi dan misi yang jelas untuk diimplementasikan dalam tatanan bernegara. Dengan kata lain, partai politik sesungguhnya memiliki orientasi yang jelas terhadap suatu Negara. Partisipasi masyarakat dalam suatu partai politik semestinya didasarkan pada orientasi nilai yang sama sehingga dapat di katakan bahwa partai sebagai pembawa aspirasi dari kelompok-kelompok pendukungnya.⁹

Berkaitan dengan empat tahap pertumbuhan dan perkembangan partai politik yang diklasifikasikan oleh Huntington tersebut, PKS relatif telah memenuhi 4 tahapan tersebut. Dengan kata lain, PKS sudah memasuki tahap akhir dari pertumbuhan partai. PKS bukan sebuah partai tunggal yang dominan akan tetapi saat ini PKS sudah mampu berkoalisi dengan partai-partai lain yang menguasai pemerintahan dan ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan di pemerintahan.

⁹ *Ibid.*

1.3.2 Fungsi partai politik

Neuman mendefinisikan parpol berfungsi sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan produksi dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Sigmund Neumann (1963) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari perilaku-perilaku yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada penguasaan kekuatan di pemerintahan dan berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda.¹⁰

Fungsi partai politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo¹¹, partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik fungsi ini terkait dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Dalam hal ini, suatu partai politik dituntut untuk mampu melakukan komunikasi vertical sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, partai

¹⁰ Sigmund Neuman (1963). Dikutip dari Anita Teresia. 2004. *Partai politik. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Jurusan sosiologi Universitas Sriwijaya.*

¹¹ Miriam Budiardjo. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: (PT. Gramedia Pustaka Utama), hal 163.

politik juga hendaknya berperan sebagai penyebar program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian sebuah partai politik memainkan fungsi dialogis yang menjadi ciri khas masyarakat demokratis. Jadi partai politik hendaknya dapat memainkan peranan sebagai pendorong proses komunikasi dua arah, Dalam hal ini komunikasi timbal balik antara rakyat dan pemerintah.

2. Media Masa merupakan sarana komunikasi politik yang memiliki peran startegis. Media massa merupakan cerminan bagi realitas sosial masyarakat disekitarnya. Peran strategis inilah yang menjadikan media massa sebagai pilar keempat dari demokrasi. Dalam konteks pilar demokrasi ini, media massa berperan sebagi “ penyambung lidah rakyat” jadi, partai politik seharusnya memahami maslah-masalah sosial dilapisan bawah dengan memberikan alternative solusi.
3. Partai politik merupakan konsep utama menunjuk kekuatan politik di masyarakat. Sebagaimana institusi-institusi lainnya, partai politik menyita waktu dan pengorbanan dari para pencipta dan pendukungnya sebelum ia dikenal dan diterima secara luas sebagai salah satu kelengkapan politik manusia modern.

1.3.3 Pengembangan Parpol Melalui Aktor

Edwin Burke, tokoh politik inggris pada tahun 1771 menulis bahwa partai adalah *“a body of men united for promoting, by their joint endeavors, the national interest upon some particular principle in which they are all agreed”*

(kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk mempermosikan, dengan usaha bersama, kepentingan berdasarkan beberapa prinsip khusus yang telah mereka setuju bersama). Sigmund Neuman melihat partai sebagai suatu kelompok yang mengidentifikasi diri dengan sesuatu tersebut dan membedakan dirinya dengan yang lain di luar itu. Neumann mendefinisikan partai politik sebagai artikulatif yang terdiri atas perilaku-perilaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Ramlan Surbakti mengartikan partai politik sebagai kelompok aktor-aktor yang terorganisir secara rapih dan setabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilihan umum dan cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil dari pemandu berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat¹².

Menurut Kuntowijoyo Sebagai kelompok aktor-aktor penggerak parpol hendaknya memiliki tiga pilar yang harus dikembangkan, dan niscayanya menjadi spirit dalam langkah gerakan, tiga pilar tersebut adalah visi kemanusiaan (humanisme), visi pembebasan, ketauhidan (trancendenci) nilai-nilai Illahiyah. (nilai-nilai idealisme)

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, op,cit.,hlm.116

Meminjam istilah Kuntowijoyo yaitu humanisme, liberation, transcendensi. Tiga pilar ini sesungguhnya penjelasan dari tafsir surat al-Imran ayat 109 yang memberikan identifikasi umat yang ideal dan visi umat yang terbaik dalam konstruksinya harus mewujudkan pilar-pilar tersebut. Kalau membahasakan hal yang sederhana konstruksi gagasan “khairu ummah” adalah adanya keseimbangan kesalahan sosial dengan kesalahan individual visi makna ayat ini aksentuasi gerakannya relevan dengan trilogy dakwah. Secara teologis gerakan dakwah kultur cukup mendasar dan bernilai qur’ani sebagai basis gerakan moral, dan identitas gerakan cukup bisa memberikan spirit perjuangan dalam memberikan tatanan kultur dan ideologis bagi para kader yang tergabung dalam suatu wadah.

Dalam realitasnya, sebagai partai politik idealnya menjadi corong moral yang mempunyai kekuatan intelektual (tafaquh fii al-din), Kenyataan kita sekarang telah terjerumus dalam lubang pragmatisme. Kita harus akui saat ini wacana keagamaan kita sangat lemah khususnya dalam pengaplikasian terhadap perilaku organisasi kita. Seolah-olah identitas keagamaan yang ada dalam kampus hanya sebatas simbol bahkan “reklame” yang melekat di dinding. dalam kancah aksiologi gerakan kita, gagasan Gramsci dengan “intelektual organik” nya yang menghasilkan gagasan praksisme intelektual mampu membedah gerakan sosial yang telah lama terdominasi. Praktik ini sering terjadi menjebak kader mudanya dengan bersentuhan dengan basis material. Sehingga semua gerakan di ukur dengan materi, bahkan kultur ini telah mewarnai para agen-agen dakwah mengapa ini terjadi kemungkinan besar tidak adanya keseimbangan intelektual dengan

spiritual, kita harus akui nuansa kekeringan spritual banyak terjadi dan bahkan tidak ada. Padahal Nabi Muhammad SAW sukses dalam perjuangan sosialnya itu diawali dengan pembacaan spiritual dan menancapkan ketauhidan yang kokoh dalam diri sendiri melalui kontemplasi spiritual (baca: surat al-Alaq ayat 1-7). spirit perjuangan propetik bukan hanya dimiliki Nabi saja tapi kita sebagai umatnya-pun punya tanggung jawab sebagai pengemban, Kenyataan pahit ini, telah terjadi dalam kader yaitu pergeseran identitas partai keadilan sejahtera dalam nuansa “pragmatisme” ini terjadi di seluruh daerah, dan bahkan seluruh mayoritas organisasi yang mereka usung, idealisme mahasiswa pun sedikit bergeser telah pudar dengan adanya pencitraan yang tidak baik dengan jebakan “politik praktis” adanya hasrat mahasiswa kedalam dunia parlemen sedikitnya telah “meninabobokan” gerakan idealisme partai politik Islam sebagai gerakan moral dengan misi propetiknya yang kemudian mampu mendobrak kultur pragmatisme para kader mudanya namun kini transformasi dialektik dalam tubuh PKS memberi arti bahwa partai ini ternodai dengan kultur pragmatisme para petinginya hal ini membuntukan gerakan penyadaran bagi para aktor di dalamnya agar mampu lebih kuat berpegang teguh pada mazhab yang telah diembannya selama ini agar mereka dapat menjawab tantangan dimasa depan (sosial competitive advantage).

Saat ini Transformasi dialektik dalam tubuh PKS dikhawatirkan akan terjebak dalam pusaran konflik internal yang berlarut-larut. Tantangan ini memerlukan kematangan dan kenegarawanan tokoh PKS agar proses transformasi tidak justru menjadi bomerang bagi kelas yang tadinya dominan. Proses transformasi sebagai hasil dari pergolakan ide dalam praktik mempertahankan

kekuatan dominan dapat menimbulkan tarik menariknya kepentingan yang penuh dengan potensi pertentangan kontradiktif baik antara para aktor yang mendominasi dengan watak oportunistnya dan kelas terdominasi yang berwatak fundamental.

Pergolakan ide dapat berupa persetujuan fundamental yang saling tarik menarik antara kepentingan dan identitas idealisme antar masing-masing kelas, dimana setiap kelas berusaha menarik oposisi yang berlawanan melalui cara mediasi (memperantai kekuatan yang dianggap mampu untuk didominasi) praktik ini bisa dilakukan sebagai bentuk untuk menumbangkan kekuatan dominan dalam satu ruang tawar. Ketika kekuatan dominan berhasil didominasi maka ruang tawar menjadi prioritas utama, untuk mempertahankan eksistensi dari lini pendominasi. akibatnya Transformasi mengacu pada keinginan kelas pendominasi sebagai pengendali ruang publik, sisi dari aspek identitas idealisme lama ternegasikan oleh prospek tawaran dari kelas pendominasi. Sebagian dari kelas dominan teralienasi dari kelompok dominannya dikarenakan mempertahankan idealisme, ruang publik dalam partai dikuasai pendominasi, aspek idealisme menjadi hal yang pudar, orientasi parpol menjadi oportunist, aspek kompetisi menjadi hal yang perlu diutamakan untuk dapat mengejar perolehan suara agar dapat korsi kuasa.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik-praktik pendominasi kekuatan dominan, sebagai modus transformasi dalam merubah orientasi PK ke PKS sejak tahun 1980-2004.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat memberi kontribusi pemikiran bagi khalayak ramai, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan baca dan pengayaan literatur, serta agar orang lainpun dapat mempelajari serta menyimak proses transformasi yang terjadi dalam tubuh parpol.

1.5. Kerangka Pemikiran

Transformasi Dialektik

Dalam pemahaman umum, proses transformasi dialektik di dalam parpol merupakan hasil dari suatu tahapan pergolakan ide yang berlangsung dalam tubuh organisasi dimana hegemoni interes dalam tubuh partai politik memberikan pengertian bahwa adanya pertautan kepentingan yang selalu memberi warna-baru dalam tubuh organisasi untuk mempertahankan eksistensinya di panggung politik, dimana hal ini merupakan cerminan warna-warni identitas idealisme para kader yang selalu bergejolak dalam suatu wadah untuk selalu mampu memberikan suatu peranan penting dalam proses transformasi parpol. Peranan-peranan identitas-idealisme itu mempengaruhi secara langsung aksi kesadaran diri bagi para aktor

dalam organisasi tersebut sehingga mereka mampu menerima setiap ide yang mampu memberi warna baru bagi orientasi gerakan mereka. Jika ditinjau dari aspek pergolakan ide sebagai arus hegemoni interes dalam tubuh organisasi, hal ini menyaratkan bahwa organisasi ini mengalami dilema dialektik yang selalu berproses dan membuka jalan baru sebagai tahapan-tahapan pembuka ruang terjadinya Transformasi Parpol.

Dilema dialektik yang dialami oleh partai keadilan sejahtera memberi isyarat bahwa adanya pertautan kepentingan yang memiliki peran besar bagi otoritas parpol, ketika organisasi ini mengalami suatu proses perubahan pada aspek orientasi gerakannya, dimana hal ini dimotori karena adanya nya pertautan-pertautan kepentingan organisasi untuk dapat melebarkan sayap secara lebih luas.

Cakupan dari aspek proses transformasi tersebut sangat jelas di latar belakang kepentingan organisasi untuk dapat memperluas jaringan kerjasaman para kadernya agar mampu merealisasikan secara langsung atau-pun bertahap harapan-harapan dari mazhab organisasinya.

Pergolakan ide melandasi terjadinya proses transformasi dimana para organisatoris yang memiliki kepentingan-kepentingan personal beradu padu dalam prospek pergolakan ide untuk saling mendominasi, hal ini-lah yang selalu menuntun mereka masuk dalam ranah pernegasian akan ide yang perlu di realisasikan, ketika alur pernegasian ini masuk fase mediasi dalam suatu forum diskusi, otomatis kekuatan yang lebih berperan mampu memperantai (oposisi

yang berlawanan) dalam artian aktor yang memiliki sedikit bentuk dukungan terikat-langsung dengan kesepakatan otoritas yang berwenang.

Ranah pernegasian mengisaratkan adanya tolak menolak antara oposisi yang saling berlawanan dimana hal ini mengisyaratkan ada perbedaan identitas-idealisme bagi para kadernya, disatu sisi mereka para organisatoris yang berpegang teguh terhadap mazhab organisasi partai politik bersiteru terhadap kelas pendominasi yang menginginkan perubahan dalam tubuh partai, dimana bentuk pergolakan ide ini sama-sama menginginkan alur konklusi kompleks kepentingan parpol, ketika pergolakan identitas idealisme ini berlangsung, para organisatorisnya otomatis mengalami dilema dialektikal sebagai poros pertentangan fundamental yang sama-sama menginginkan kebaikan bagi kepentingan parpol nya. Namun jika ditinjau dari sisi latar belakang kondisi parpol yang ingin mengejar target untuk mendapatkan 20 % suara masa, maka blok oposisi pun mengambil poros tengah sebagai sintesa akhir yang menuntun parpol menjadi partai terbuka dan lebih progresif sifatnya. Pergolakan ini memberi arti bagi otoritas kepentingan organisasi wacana yang telah mereka sepakati bersama merupakan sintesa akhir sebagai proses transformasi parpol yang tadinya konserpatif sifatnya , menjadi parti terbuka yang lebih progresif. Keterbukaan ini membuka polemik baru bagi partai politik yang baru bertransformasi.

1.5.1 Hegemoni Kelas Dominan

Namun jika ditinjau dari hegemoni interes dalam tubuh Partai keadilan sejahtera hal ini ada kepentingan besar yang memanipulasi kondisi parpol dimana dari kenyataan dialog-dialog yang ditawarkan di dalam ruang ekonomi dan politik, peneliti mengidentifikasi adanya hegemoni kelompok terselebung sebagai pengendali yang memiliki tawaran-tawaran menjanjikan bagi parpol tersebut.

Praktik dominasi kekuatan parpol terhadap publik dengan cara “halus”. Dalam praktek dominasi ini, kelas terselubung tidak secara kentara menyusun aturan parpol, memaksa, mengajak atau mengontrol kelas terdominasi. Demikian pula kelas terdominasi yang tanpa sadar (*unconciusness*) dan tanpa paksa mengikuti permainan tadi. Adalah pengertian yang salah ketika menganggap hegemoni bekerja dengan cara represif saja tampak kontras, namun praktik hegemoni adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan kasat mata.

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan dialog-dialog yang ditawarkan di dalam ruang ekonomi dan politik, menurut Antonio Gramsci jika hegemoni kelompok dominan tidak selalu bekerja dengan cara mereduksi/mengekang keinginan-keinginan berposisi dari kelompok bawah (*grass root*) dan penekan (*pressure groups*), namun juga dapat bersinergi dengan proses represif terhadap kelompok pembangkang (anti status quo). Akomodasi negara (*state*) dan pengusaha (*capital*) terhadap kelompok terdominasi ini dilakukan dalam kerangka praktik kekuasaan secara menyeluruh. Dalam hegemoni, proses reduksi dengan kekuatan dilakukan untuk menutup saluran perlawanan dari kelompok penekan,

sementara akomodasi ditujukan kepada kelompok yang dapat diajak bernegosiasi untuk menciptakan aliansi-aliansi. Istilah ini dikenal dalam terminologi politik modern dengan istilah manajemen konflik belah bambu (*stick and carrot policy*).

Sebagaimana tulisnya :

A class dominant in two ways, i.e. 'leading and dominant'. It leads the classes which are its allies, and dominates those which are its enemies. (Satu kelompok mendominasi dalam dua cara. "Kepemimpinan dan dominansi" Ia menjadi pimpinan kelompok yang dianggap sekutu, dan mendominasi kepada mereka yang dianggap musuh)

Hegemoni cenderung bekerja dengan cara mencari dukungan yang legitimet dan legal dari kelompok mayoritas yang terdominasi melalui proses-proses yang "demokratis". Penciptaan opini publik, pemilihan umum, parlemen, media massa, dan organ intelektual adalah bentuk-bentuk saluran untuk melegalisasi proses hegemoni melalui cara-cara yang "sah". Dalam format seperti itu proses penghegemonian dari group dominan akan menampilkan wajah yang sangat adoptif terhadap segala isu-isu yang di arahkan kepada kekuasaan, dengan maksud menunjukkan bahwa otoritas partai mereka sangat 'demokratis'. Kekuasaan tidak berwujud tirani melainkan mengakomodir segala

Dimana legitimasi diperoleh melalui penciptaan opini, parlemen, dan legalisasi oleh kelompok intelektual-moral. Sebagaimana pembagiannya di atas, Gramsci menambahkan pokok intelektual-moral sebagai manifestasi kelompok supremasi. setiap orang dalam pandangannya tidak dapat tidak akan selalu mempraktikkan intelektualitas dalam setiap aktivitasnya.

that the supremacy of a social group manifest itself in two ways, as dominantion and as intellectual and moral leadership dominates antagonistic groups, which it tends to liquidate, or to subjugate perhaps even by force. (bahwa

kelas utama dari kelompok sosial mewujudkan dirinya dalam dua cara, dominasi, dan sebagai acuan kepemimpinan intelektual dan moral dominasi terhadap kelompok perlawanan, ditujukan untuk membekukan, atau memilah dengan paksaan jika diperlukan.)

Oleh karenanya setiap orang adalah intelektual organis bagi masyarakat dalam pandangan Gramsci, dengan sendirinya tidak ada intelektual yang dapat diam menghadapi realitas yang terjadi. Permasalahannya adalah dilema ketika intelektual harus memilih untuk turut serta dalam praktik penguasaan politik terselubung agar pengaruh yang ditawarkan tidak tampak, kelompok minoritas dominan atau turut kepentingan kelompok mayoritas terdominasi. Sedemikian penting fungsi intelektual Gramsci mencatat;

Critical self-consciousness means, historically and politicaly, the creation of an elite of intellectuals. A human mass does not distinguish itself, does not become independent in its own right without in the widest sosial sense, organising itself: and there is no organisation without intellectuals, that is without organisers and leaders...But the process of creating intellectuals is long and difficult, full of contradictions, advances and retreats, dispersal and regrouping, in which the loyalty of the masses is often sorely tried.

Kesadaran kritis bermakna bahwa masalah sejarah dan politik, adalah masalah membentuk kelompok elit intelektual. Suatu kelompok massa tidak dapat memilah dirinya untuk menjadi bebas tanpa kepekaan sosial yang luas untuk mengorganisasi diri, dan tidak ada organisasi tanpa kaum intelektual, organisator, serta pemimpin. Tetapi proses membentuk intelektual membutuhkan waktu panjang dan sulit, penuh kontradiksi, menantang atau berdamai, memecah atau menyatukan nya dimana (penciptaan) loyalitas massa sering meminta keseriusan yang tinggi.

Dengan demikian dalam pandangan Gramsci, hegemoni bukanlah praktik yang tidak dapat diciptakan kembali. Hegemoni tidak dapat dipandang sebagai

prosedur pengontrolan massa dengan tujuan kekuasaan belaka. Ia dapat dilakukan untuk menarik dukungan dan menciptakan pengikut yang loyal dalam menjabarkan gagasan besar, moral dan intelektual dengan tujuan yang bermanfaat kepada masyarakat umum (kelompok yang dihegemoni). Sejujurnya bagi Gramsci praktik relasi kuasa akan selalu bertujuan mengambil alih kepemimpinan moral dan intelektual dengan segala cara dan kesulitan yang mendalam. Untuk itu menurutnya intelektualitas akan menjadi subjek yang penting dalam perubahan sosial, dimana untuk melakukan perubahan sosial, masyarakat awam meniscayakan kebutuhannya akan sosok intelektual yang dapat terlibat di dalam perubahan itu sendiri. Ia menyebut intelektual yang mau bekerja untuk suatu perubahan sosial dengan istilah intelektual organik.

Dilain waktu peran pembentukan intelektual organis sendiri akan menjadi dilema dan bagian dari proses hegemoni yang selalu menampilkan sisi tautologi (bertolak belakang), disatu sisi intelektual adalah harapan masyarakat untuk perubahan, di sisi lain ia dapat berfungsi sebagai alat untuk mendominasi kekuasaan. Adalah Louis Althusser, Julian Benda, Michele Foucault, dan Edward Said yang mengembangkan kedudukan intelektual dan ilmu pengetahuan sebagai aparatur kekuasaan dalam bentuk teori-teori yang lebih rinci.

Gramsci's theory suggests that subordinated groups accept the ideas, values and leadership of the dominant group not because they are physically or mentally induced to do so, nor because they are ideologically indoctrinated, but because they have reason of their own. Teori dari Gramsci menyebutkan bahwa kelompok subordinat menerima ide-ide, nilai-nilai dan kepemimpinan dari kelompok dominan bukan karena alasan fisik atau mental belaka, sehingga mereka untuk terpaksa menerima hal demikian, tidak juga karena alasan doktrin ideologis, namun karena mereka memiliki alasannya sendiri.

Disebabkan kurangnya kesadaran awam akan perubahan maka dalam transformasi gerakan, kelompok menengah, kaum terpelajar, dan intelektual memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di wilayah publik. Adalah terlalu naif mengharapkan persoalan kelas diselesaikan oleh kelompok terdominasi tanpa adanya keterlibatan kelompok intelektual dan kaum agamawan (moralis). Pentingnya peran kelompok ini menjadi alasan bagi kelompok dominan (negara dan kapital) untuk mengambil alih kepemimpinan dan menguasai kelompok moralis intelektual dalam kontrol gugus kekuasaan mereka. Gugus ini berfungsi menjinakkan intelektual dan memfungsikannya sebagai bumper kekuasaan dominan dalam menghadapi kelompok-kelompok perlawanan.

Gugus ini oleh Althusser disebutnya dengan istilah Ideological State Apparatus/ISA (aparatur ideologis negara) istilah yang dikembangkannya dari gugus aparatur negara (State Apparatus/SA) dari Karl Marx. Dalam teorinya Marx membagi praktik hegemoni apartur ini kepada gugus.

Dari penjelasan panjang dalam kerangka pemikiran tersebut maka peneliti mendapat suatu kesimpulan bahwa orientasi partai politik terkendai oleh tawaran dan berbentuk harapan akan kedudukan sebagai bentuk kendali dari otoritas kelompok dominan yang berada dibalik layar, yang selalu berusaha mengkondisikan partai politik intelektual dan mengenyampingkan identitas idealisme tentang seruan-seruan moral dan keadilan.

Hegemoni dalam ruang publik ini, ditujukan untuk melanggengkan sistem kekuasaan yang lebih maju dari sekedar masalah pemerintahan. Hegemoni dalam ruang publik adalah politik penguasaan ruang kongkrit itu sendiri. Ruang

hidup tidak mungkin bebas nilai, ia merupakan medan dialog kekuatan-kekuatan dominan, dimana penguasaan ruang dilakukan dengan menciptakan tanda-tanda (simbol) keberhasilan sebuah pengendali ideologi yang menyuarakan seruan moral dan intelektual.

1.5.2 Teori Asal Mula Partai Politik (Duverger)

Duverger adalah seorang ilmuwan sosial yang memiliki perhatian pada bidang kajian sosiologi politik. Menurut Duverger banyak yang melihat politik sebagai ilmu negara, sedangkan mayoritas yang lain melihatnya sebagai ilmu tentang kekuasaan. Duverger menyetujui pendapat mayoritas tersebut karna konsep politik sebagai ilmu kekuasaan mempunyai suatu keunggulan yang mendasar, yaitu ia lebih operasional . disisi lain perlunya kekuasaan di pelajari dalam kerangka-kerangka yang lain selain negara. Duverger melalui kajian sosiologi politik nya mencoba membawa wacana bahwa kekuasaan dalam ilmu politik hendak nya dikaitkan dengan kerangka sosial di luar negara, karna penjelasan yang akan muncul dirasakan menjadi tidak kaku dan lebih luas. Duverger secara langsung ikut membahas lembaga politik dalam kajian nya. Salah satu yang ikut dibahas adalah partai politik. Duverger mengatakan bahwa asal mula partai politik dimulai dari dua hal, yaitu pembentukan partai politik dari intra parlementer dan pembentukan partai politik dari ekstra parlementer. Pembentukan partai dari intrai parlementer dan ekstra parlementer memiliki gambaran yang kontras .

Partai-partai ekstra parlementer umum nya lebih tersentralisir di bandingkan partai intra parlementer. perkembangan ekstra parlementer biasanya

dimulai dari atas, sementara parta intra parlementer memulai basisnya. Kelompok-kelompok lokal dimana komite-komite atau kelompok-kelompok lokal partai ekstra parlemen dibentuk dari pusat yang telah ada sebelumnya karena itu bisa mengatasi bertindak komite-komite atau kelompok lokal tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan.¹³

Partai-partai yang tumbuh di luar lingkaran parlemen pada umumnya lebih khoeren dan lebih berdisiplin daripada partai-partai yang ada di dalam lingkaran parlemen. Partai ekstra parlementer telah lebih dahulu mempunyai organisasi, baru mempunyai jaringan sel-sel baru kemudian mempersatukan jaringan-jaringan sel-sel mereka dalam satu wadah. Partai intra parlementer memandang satu wadah memiliki satu perhimpunan-perhimpunan, namun titik awal pembentukan justru ko-eksistensi dari wakil-wakilnya di parlemen.¹⁴ Dalam partai intra parlementer mendapatkan kedudukan di parlemen dan majelis-majelis politiknya adalah dasar kebutuhan partai yang merupakan alasan mendasar bagi eksistensi dan supermasi parpol. Dilain pihak partai-partai ekstra parlementer , perjuangan dalam pemilihan umum maupun parlemen merupakan hal penting, namun hanya sebagai elemen aktivitas partai, dan sebagai salah satu saran yang dipakai untuk tujuan-tujuan politiknya, partai ekstra parlementernya lebih independen dalam cara bergeraknya.¹⁵

¹³ Ihsanul Amal (ed), *Teori-Teori Mukhtahir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hlm. 13-15.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

1.6. Definisi Konsep

Pengertian konseptual dalam pokok penelitian ini adalah :

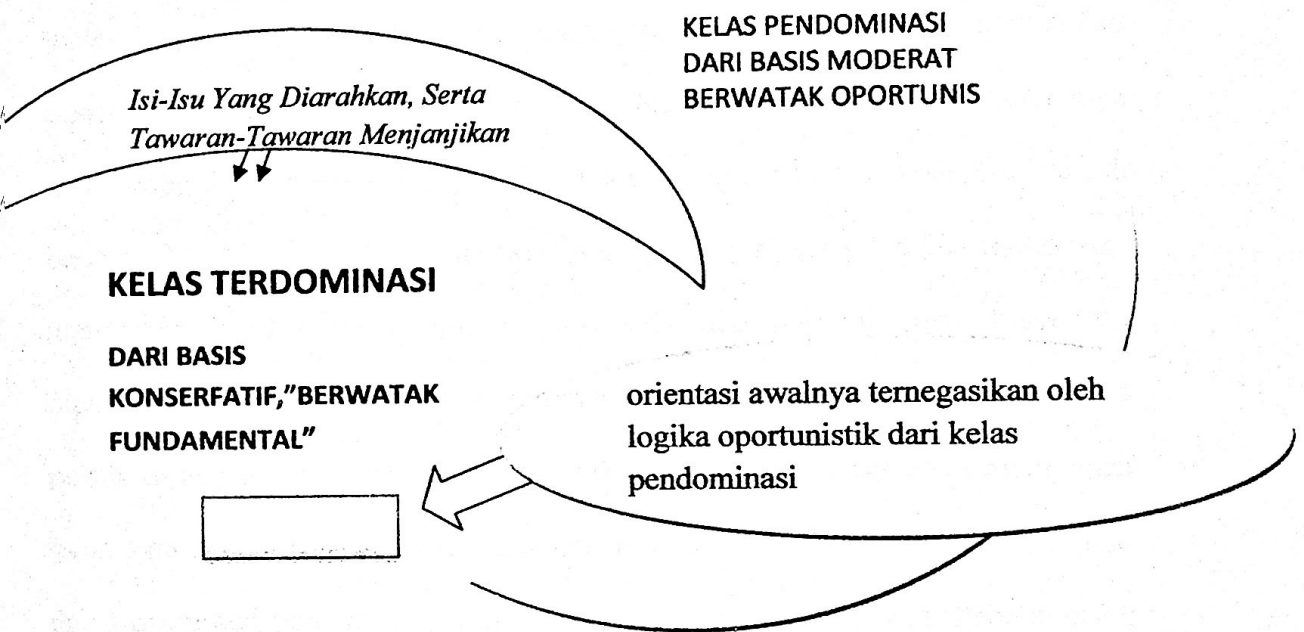
- 1) Transformasi parpol adalah gambaran atau deskripsi mengenai hegemoni interes yang terkendali oleh keadaan yang senantiasa berproses; selalu bergerak (Sorjono soekanto, 1983 : 136) transformasi perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dsb): Transformatif berpijak pada poros perubahan secara utuh dan menyeluruh di setiap ranah aturan kehidupan masyarakat, seperti. Transformasi ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sifat bagi lembaga organisasi atau partai politik pendidikan bahkan sistem keamanan negara dan struktur negara.
- 2) Transformasi juga diartikan bahwa perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain adalah mengganti sesuatu dengan yang baru dan meniadakan bentuk lama. Sementara transformasi dilakukan dengan menunjukkan hal yang baru, bentuk serta nilai-nilai lama jelas mengalami pergeseran. Transformasi yang dilakukan tidak terbatas pada aspek fisik/profan tetapi juga melibatkan aspek non fisik. Aspek non fisik dapat dilihat dengan jelas terkait dengan bentuk strategi, simbol dan pendekatan. Sedangkan pada aspek non fisik nilai dan ideologi sedikit banyak merupakan pengaruh dari aspek fisik tersebut.¹⁶

¹⁶ Mansyor Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.38.

1.7 Model Analisis

HEGEMONI KELAS PENDOMINASI

A class dominant in two ways, i.e. 'leading and dominant'.



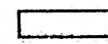
= Kelas Pendominasi



= Kelas Terdominasi



= orientasi awalnya ternegasikan oleh logika oportunistik dari kelas pendominasi yang memiliki peran kontrol dalam membendung hegemoni ideologi dari basis kelas-kelas fundamental



= Ideologi Islam sebagai representasi pendukung fundamental



= Proses penghegemonian dari group dominan akan menampilkan wajah yang sangat adoptif terhadap segala isu-isu yang diarahkan kepada kekuasaan, dengan maksud menunjukkan bahwa otoritas partai bukan-lagi pada basis representasi dari ideologi lama, namun orientasinya lebih mengarah pada praktik-praktik dominasi kekuatan parpol untuk dapat mengeser nilai-nilai identitas idealisme lama dari partai tersebut.

1.8 Asumsi penelitian

Pada penelitian ini peneliti mempunyai asumsi yaitu, dari PK ke PKS merupakan basis gerakan politik Islam yang mengusung mazhab identitas idealisme Ikhwanul muslimin sebagai derivat dari pemahaman Islam. Hal itu pudar hingga tahun 2004. karna hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal gerakan Ikhwanul Muslimin. Kedua faktor bersifat mendukung juga mendorong. Faktor internal merupakan faktor yang sengaja dipersiapkan dan dibangun oleh aktor-aktor Ikhwanul Muslimin. Sedangkan sebagian faktor eksternal merupakan kondisi sosial politik yang ada dimasyarakat pada masa itu, dipengaruhi peran negara atau pemerintah sebagai suprastruktur juga peristiwa politik di luar negeri terkait dengan gerakan Islam. Faktor eksternal merupakan salah satu pendorong Ikhwanul Muslimin terdominasi sehingga bisa sesuai atau dapat mengikuti perkembangan dinamika sosial politik yang ada. Penelitian ini juga memiliki asumsi bahwa partai politik sebagai hasil dominasi kelas yang berwenang masuk dalam kategori partai politik yang telah tertransformasikan akibat dominasi suatu kelas dominan dalam bagian akhir skripsi ini kelas pendominasi diartikan sebagai; para aktor dalam tubuh PKS yang berwatak oportunistik, kelas terdominasi dalam tubuh PKS ialah mereka yang tradisional bersifat fundamental.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. *Qualitative Research* diartikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara lebih terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.¹⁷ Dalam pendekatan kualitatif, tulisan mencoba menampilkan data-data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan terhadap objek yang diamati. Metode kualitatif memiliki karakteristik yang menekankan pada studi kasus, konteks, dan interpretasi peneliti dalam menganalisis data.¹⁸

Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis karena beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu, *pertama*, penelitian yang penulis angkata merupakan gejala sosial yang dinamis, yaitu perkembangan gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai basis politik PK dan PKS. Basis tersebut ada karena proses transformasi tersebut bukanlah gejala yang statis dan kaku sehingga penggunaan pendekatan kualitatif tidak saja dimungkinkan tetapi dibutuhkan

Kedua, data-data yang didapatkan merupakan bentuk pemikiran, ucapan, tindakan hingga gambaran sosial-politik dalam masa tertentu. Data tersebut merupakan bentuk data yang sifatnya kualitatif dan tidak bisa ditransformasikan

¹⁷ John W. Cresswell, *Research Design* (Jakarta: KIK Press, 2002), hlm.1.

¹⁸ Lawrence W. Newman, *Social Research Methods, 5th edition* (Boston: Allyn and Bacon, 2003), hlm. 146-149

menjadi data kuantitatif. Terlebih penelitian kualitatif menempatkan proses gejala atau masalah yang diangkat sebagai bagian dalam penelitian dan bukan pada hasil akhir. Diharapkan penggunaan data kualitatif dapat menjelaskan secara komprehensif fenomena politik yang diangkat dalam penelitian ini.

1.9.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menemukan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

1.9.3 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini bergantung pada data yang diobservasi orang lain dari pada yang diobservasi oleh peneliti sendiri. Penulis akan menganalisis keotentikan, ketepatan dan pentingnya sumber-sumber yang ditemui. Penelitian historis mirip dengan penelaahan kepustakaan, namun cara pendekatan historis adalah lebih tuntas, mencari informasi dari berbagai sumber. Penelitian historis juga mencoba mencari informasi dari yang dituntut dalam penelaahan kepustakaan.¹⁹

¹⁹ Sumardi Subrta, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.73-74

1.9.4. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian Dalam skripsi ini, mengenai praktik-praktik pendominasi kekuatan dominan dalam mentransformasikan orientasi gerakan PK ke Partai Keadilan Sejahtera.

1.9.5. Informan

Dalam penelitian ini, penelitian mengambil informan secara purposive. Informan dalam penelitian ini diambil dari tiga sisi yaitu anggota partai yang masih aktif dan yang telah keluar dari Partai Keadilan Sejahtera beserta simpatisan partai.

1.9.6. Data Dan Sumber Data.

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata dan tindakan orang yang diamati serta yang diwawancarai, dan data tambahan seperti documenter, literature, artikel, ataupun berita-berita mengenai objek yang diteliti (Moleong, 2000:112). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah.

1.9.7. Data

Data primer, yaitu data utama berupa kata-kata, tindakan serta keterangan atau informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari informan tersebut di atas, yang mana informan inilah yang akan memberikan informasi mengenai proses transformasi sebagai hasil dari pergolakan ide yang terjadi dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera. Data sekunder, yaitu data yang

diperoleh dari buku-buku literature, artikel-artikel Koran, berita-berita dikoran, serta data-dari eksplorasi di internet.

1.9.8. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah: yaitu mereka para aktifis penggerak dakwah kampus yang dipilih sebagai informan untuk member informasi selengkap-lengkapnyanya kepada penelitian. Selain itu sumber data-data yang diperoleh melalui eksplorasi di situs-situs internet.

1.9.9. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1.9.9.1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan para informan-informan yang ada. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi bagaimana proses transformasi pada masa tersebut berlangsung serta factor-faktor apa saja yang melatar belakanginya. dalam Proses mendapatkan informasi dari para informan dilakukan dengan cara, mulai dari wawancara langsung hingga menelusuri permasalahan dengan cara mengali informasi tertulis melalui media cetak atau-pun elekteronik

1.9.9.1. Teknik Dokumenter

Teknik documenter teknik ini adalah cara mengumpulkan data dengan cara melalui peninggalan tertulis, berup arsip-arsip dan termaksud buku-buku tentang pendapat, teori, dalil / hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan

masalah penyelidikan. Oleh karena dalam setiap penelitian tidak pernah dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi seperti ini menjadi sangat penting (Hadari nawawi,2003;133)

1.9.10. Gambaran Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam oleh tokoh yang terlibat dalam proses transformasi gerakan Ikhwanul Muslimin menjadi PK dan pernah aktif dalam PKS. Proses transformasi partai PKS tersebut belum terlalu lama terjadi dan sebagian besar tokoh yang terlibat langsung masih hidup dan dapat ditemui, sehingga data primer tidak hanya fokus pada data-data gerakan Ikhwanul Muslimin tetapi juga bisa menyentuh aspek personal dari informan atau tokoh-tokoh yang terlibat secara aktif dalam transformasi gerakan Ikhwanul Muslimin menjadi PK.

Saat ini para tokoh yang aktif di PKS memiliki dua latar belakang, tokoh yang terlibat langsung dengan proses transformasi dan tokoh yang tidak terlibat langsung dengan proses transformasi tersebut. Di sisi lain, data mengenai sejarah pergerakan Ikhwanul Muslimin hingga terbentuk partai (PK dan PKS) tersimpan cukup baik, sehingga peneliti juga bisa melakukan wawancara pada agen gerakan Ikhwanul muslimin yang terlibat secara langsung untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data primer juga dapat diperoleh dari pemikiran-pemikiran para agen gerakan Ikhwanul muslimin melalui tulisan-tulisan yang dibuat dalam bentuk

buku. Buku tersebut dibuat pada saat dan setelah transformasi telah terjadi. Buku tersebut secara umum mudah diperoleh karena banyak tersebar dikalangan internal atau kader dari PKS saat ini.

Data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur dalam bentuk buku, jurnal hingga artikel yang ditulis oleh para akademisi dan peneliti. Data sekunder menggambarkan mengenai sejarah, latar belakang proses transformasi hingga konsep ideologi yang dimiliki aktor-aktor PK dan PKS sebagai partai politik hasil transformasinya beserta dengan para agennya. Data sekunder juga dapat diperoleh oleh tokoh PKS yang pernah secara langsung berinteraksi dengan agen Ikhwanul muslimin dan PK yang aktif dan terlibat langsung dalam proses transformasi tersebut.

1.11. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi-organisasi yang dimaksud adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1.12. Penentuan Informan

Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk member informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif atau di tetapkan secara sengaja oleh peneliti yang bertujuan mengambil informasi dari orang-orang yang benar-benar terlibat dalam permasalahan organisasi.

Data yang di peroleh merupakan wawancara langsung terhadap para informan dimana Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 2 mantan pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera, dan 3 pengurus Dewan perwakilan wilayah di tingkat propinsi (DPW) serta 2 mahasiswa universitas Sriwijaya yang menjadi kader PKS, dan 2 mantan pengurus DPD.

NO	Nama / Inisial informan	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan/ jabatan
1	ED	79 th	L	Mantan Pengurus PKS di tingkat DPP
2	RHD	45 th	L	Mantan Pengurus PKS di tingkat DPP
3	AH	27 th	L	Pengurus DPW (PKS)
4	KH	48 th	L	Pengurus DPW (PKS)
5	RZ	24 th	L	Pengurus DPW (PKS)
6	FB	24th	L	Mahasiswa
7	QB	21th	L	Mahasiswa
8	MW	53TH	L	Mantan Pengurus DPD
9	HD	50th	L	Mantan Pengurus DPD

1.13. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dalam empat Bab.

1. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang diuraikan sebagai (1) latar belakang, (2) perumusan masalah, (3) Tinjauan Pustaka, (4) tujuan dan signifikansi penelitian, (5) kerangka pemikiran dan konsep-konsep yang relevan, (6) metodologi yang mencakup pendekatan penelitian, tipe dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, gambaran pengumpulan data, dan keterbatasan penelitian, dan (7) sistematika penulisan
2. Bab II. Dipaparkan mengenai gambaran objek yang di angkat dalam bentuk rentetan fakta sejarah terbentuknya PK yang bertransformasi ke PKS .
3. Bab III. Pembahasan disajikan dalam bentuk periodisasi gerakan. Pembahasan tersebut penting untuk memberikan pemahaman awal terhadap objek yang dikaji. Dipaparkan juga mengenai keadaan sosial politik dan juga pergolakan ideologi yang ada pada saat itu. Secara umum akan menerangkan mengenai keadaan umat islam pada masa Orde Baru. Bab ini akan memperinci keterkaitan faktor eksternal sebagai kelas pendominasi Ikhwanul Muslimin serta pergolakan ideologi sampai pertautan kepentingan yang terjadi didalamnya. Periode tersebut terbagi menjadi tiga bagian:
 - *pertama*, rentang waktu awal Orde Baru hingga tahun 80-an, yang merupakan periode antagonistik.

- *Kedua*, periode awal 80-an hingga akhir 80-an, dimana pandangan rezim Orde Baru terhadap politik islam terlihat resiprolak-kritis.
- *Ketiga*, periode 90-an awal hingga awal reformasi, sesaat setelah rezim Orde Baru lengser. Periode ini terlihat dengan bergesernya bandul politik Orde Baru mendekati kelompok Islam dan mulainya era reformasi dimana keterbukaan politik dan demokratisasi dibangun. Bagian akhir dari bab ini memaparkan tentang praktik-prakti dominasi kekuatan dominan yang secara tidak kentara menyusun aturan paarpol, memaksa, mengajak atau mengontrol kelas terdominasi. Demikian pula kelas terdominasi yang tanpa sadar (unconciusness) dan tanpa paksa mengikuti permainan tadi.

4. Bab IV. Merupakan kesimpulan dari pertanyaan yang ada diawal skripsi serta rangkaian analisa yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini juga menjelaskan pergeseran identitas ideologi yang ada pada PKS.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bana, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*.

Amal, Ichlasul. *Teori-teori Mukthahir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.

Al Maududi, Abu Al A'la dkk. *Al Jihad Li Al Aimmah Ats Tsalatsah*, diterjemahkan oleh Syatiri Matrais dengan judul *Jihad Bukan Konfrontasi: Meluruskan Makna Jihad Islam dalam Realitas Kehidupan Masyarakat Moderen*. Jakarta: Penerbit Cendikia, 2001.

Abdila, Masyukri. *Demokrasi di Persimpangan makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1999.

Buchori, Din Saefuddin. *Sejarah Politik*. Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009

Budiarjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*, edisi revisi. Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1998.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Cresswel, John W. *Research Desing*. Jakarta: KIK Press, 2002.

Damink, Ali Said. *Fenomena PK*. Jakarta: Teraju, 2002.

Effendy, Bahtiar. *Islami dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.

Fahmi, Nashir. *Menegakkan Syariat Islam ala PKS*. Solo: Era Intermedia, 2006.

Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Furkon, aay Muhamad. *PKS: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Traju, 2004.

Hamid, Ahmad Farhan. *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi politik dalam Negara kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan partnership, 2008.

Mata, Anis. *Dari Gerakan ke Negara*. Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006.

Minardi, Anton. *Konsep Negara dan Gerakan baru Islam menuju Negara Moderen Sejahtera*. Bandung: Prisma Press, 2008.

Newman, Lawrence W. *Sosial Research methods*, 5th editor. Boston: Allyn and Barcon, 2003.

Prasetyo, Eko. *Membela agama Tuhan: Posisi Agama islam dalam Pusaran Konflik Global*. Yogyakarta: Insists press, 2002.

Rahmat, Muhammad Imdadun. *Arus baru Islam radikal: Transmisi revivalisme Islam di Timur tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga press, 2005.

Rais, Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Romli, Lili. *Islam yes Partai Islam Yes : Sejarah Perkembangan partai-Partai Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sanderson, Sthepen K. *Sosiologi makro*. Jakarta Rajawali Press, 1993.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006.

Thaba, abduh Aziz. *Islam dan Negara dalam politik orde baru*. Jakarta: Gema insane Press, 1996.

Artikel, Jurnal dan Dokumen

Baswedan, anis Rasyid. "Politik islam di Indonesia: Presnt and future Trajectory" dalam *asian Survey*, Vol. 44. No.5.2004.

Ja'far, Fathuddin, *jalan dakwah: Antara Orisinalitas dan Penyimpangan* 2010

PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Platform Kebijakan pembangunan falsafah dasar perjuangan Anggaran Dasar/ Anggaran rumah Tangga*. 2008.

Hefner, Robert W. "Islam State and Civil Society" dalam Indonesia, vol. 56.1993.

Hefner, Robert W." *Public Islam and The Problem of Democratization*" dalam *Sociology of Religion*, Vol. 62. No.4.2009.

Mashadi, et. Al. "tausyiah untuk murroim "Am" dari Sembilan ustadz dan ustazah mengenai permasalahan internal partai, 28 Maret 2008.